Lampiran : Peraturan Desa Lompulle

Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : Februari 2016

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

1. **Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Mekanisme penyusunan RKP Desa Benteng Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
10. **Visi dan Misi**

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Lompulle Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Lompulle yang tertuang dalam RPJM Desa Lompulle Tahun 2017 - 2022, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lompulle, yaitu :

**“DESA LOMPULLE YANG MAJU DAN MANDIRI BERLANDASKAN SEMANGAT KEKELUARGAAN”**

Sedangkan Misi Desa Lompulle adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Desa Secara berkesinambungan yang mendukung perekonomian Desa berdasarkan skala Prioritas
2. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, Home Indutsri, Usaha Mikro Kecil dan menengah. Fokus dari misi ini adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Desa
3. Mendorong Pemerataan pembangunan dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
4. Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antara berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, Tokoh Agama, Pemuda)
5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak hak dasar berupa kesehatan, Pendidikan, & Kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan rasa aman, damai dan tenteram.
6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment) berdasarkan demokratisasi, transparansi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

**1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Lompulle Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lompulle Tahun 2017.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Lompulle Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Lompulle Tahun 2016 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2017 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Lompulle Tahun 2017 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 - 2022.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Lompulle yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2017.

**1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

RKP Desa Lompulle Tahun 2017 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Soppeng.
11. Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 01 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Soppeng.
12. Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 01 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Lompulle Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1.4. Sistematika Penyusunan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.2.4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa

2.3. Permasalahan dan isu strategis

**BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pendapatan Asli Desa

**BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

**BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

**BAB VI PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

**2.1. Kondisi Objektif Desa**

**2.1.1. Sejarah Desa**

**Sejarah Desa**

Desa Lompulle merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Desa Lompulle terdiri atas 2 Dusun yakni Dusun Alliwengeng dan Dusun Mattanru. Desa lompulle sebahagian besar penduduknya adalah petani. Sekitar Tahun 1947-1950 Desa Lompulle bergabung dengan Desa Kebo. Namun, kedua Desa ini terpisah sekitar pada tahun 1984-2002.

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Lompulle :

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Kepala Desa** |
| **1947-1950** | **Petta Bau Ali** |
| **1950-1955** | **Andi Page (Petta Sulewatan)** |
| **1955-1965** | **Pangijjang** |
| **1965-1984** | **Andi Makkulawu** |
| **1984-2002** | **Andi Sade** |
| **2002 -** | **A.Sumange** |
| **2003 – 2008** | **Hj. A. Irmawati** |
| **2008 - 2014** | **Sudarman** |
| **2014** | **A.Hardianti,Msi** |
| **2015 - 2016** | **A.Saharuddin** |
| **2016** | **Drs. Abd. Rahim (PLT)** |
| **2017 - Sekarang** | **Amri, S.Sos** |

**2.1.2. Sumber Daya Alam**

Desa Lompulle merupakan salah satu desa di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, memilik luas 1.238, 47 ha. Secara geografis Desa Lompulle berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kab. Wajo
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Kebo
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Belo dan Kel. Pajalesang
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kesssing dan Desa Belo

Secara Administratif, wilayah Desa Lompulle terdiri dari 2 Dusun. Secara umum Tipologi Desa Lompulle terdiri dari persawahan, perkebunan, peternakan .Topografis Desa Lompulle secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Lompulle diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl).

Tabel. 1

Penggunaan lahan Desa Lompulle dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Penggunaan Lahan** | **Tahun (Ha)** | | | | | |
| **n-6** | **n-5** | **n-4** | **n-3** | **n-2** | **n-1** |
| **Lahan Sawah** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Irigasi Teknis |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Irigasi Setengah Teknis |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Irigasi Sederhana Milik PU |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Irigasi Non PU |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tadah Hujan |  |  |  |  |  | 863.75 |
| **Lahan Bukan Sawah** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pekarangan/Bangunan |  |  |  |  |  | 18.98 |
| 2. | Kebun |  |  |  |  |  | 243.58 |
| 3. | Ladang/Huma |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengembalaan/Padang Rumput |  |  |  |  |  | 289.92 |
| 5. | Sementara Tidak Diusahakan |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Hutan Negara |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Perkebunan |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rawa-rawa |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tambak |  |  |  |  |  | 60.25 |
| 11. | Kolam/Empang |  |  |  |  |  | 4.07 |
| 12. | Lahan Lainnya |  |  |  |  |  | 20.45 |

Tabel. 2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komoditas** | **Produksi Per Tahun** | | | | | | |
| **Satuan** | **n-6** | **n-5** | **n-4** | **n-3** | **n-2** | **n-1** |
| **1.** | **Tanaman Pangan** | Ton/Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  | Padi |  |  |  |  |  |  | **4.264** |
|  | Jagung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubi Kayu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubi Jalar |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Buah-buahan** | Ton/Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeruk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pepaya |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Perkebunan** | Ton/Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelapa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopi |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Peternakan** | Ekor |  |  |  |  |  |  |
|  | Sapi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kerbau |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kambing |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ayam |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Perikanan** | Ton/Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  | Empang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keramba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tambak |  |  |  |  |  |  |  |

Dari kondisi alam Desa Lompulle diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lompulle dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Lompulle.

**2.1.3. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Penduduk Desa Lompulle berdasarkan Profil Desa tahun 2016 sebanyak 2.895 jiwa yang terdiri dari 1.370 laki-laki dan 1.525 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Lompulle Kecamatan Ganra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Sumber Daya Manusia** | **Satuan** | **Tahun** | | | | | |
| **n-6** | **n-5** | **n-4** | **n-3** | **n-2** | **n-1** |
| 1. | Penduduk dan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.  Penduduk Laki-laki | Orang |  |  |  |  |  | **1.370** |
|  | b.  Penduduk Perempuan | Orang |  |  |  |  |  | **1.525** |
|  | c.  Jumlah Keluarga | Keluarga |  |  |  |  |  | **880** |
| 2. | Sumber Penghasilan Utama Penduduk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.  Pertanian, Perikanan, Perkebunan | Orang |  |  |  |  |  | **711** |
|  | b.  Pertambangan dan Penggalian | Orang |  |  |  |  | - | **1** |
|  | c.  Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.) | Orang |  |  |  |  | - | **14** |
|  | d.  Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan | Orang |  |  |  |  |  | **13** |
|  | e.  Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | Orang |  |  |  |  |  |  |
|  | f.   Jasa | Orang |  |  |  |  | - |  |
| 3. | Pekerjaan/Mata Pencaharian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.     Petani | Orang |  |  |  |  |  | **469** |
|  | b.     Buruh Tani | Orang |  |  |  |  |  | **162** |
|  | c.      Buruh Migran | Orang |  |  |  |  |  | **2** |
|  | d.    PNS | Orang |  |  |  |  |  | **71** |
|  | e.     Pengrajin | Orang |  |  |  |  |  | **3** |
|  | f.       Pedagang Barang Kelontong | Orang |  |  |  |  |  | **3** |
|  | g.     Peternak | Orang |  |  |  |  |  | **4** |
|  | h.     Montir | Orang |  |  |  |  |  | **22** |
|  | i.       Perawat Swasta | Orang |  |  |  |  |  | **2** |
|  | j.       Bidan Swasta | Orang |  |  |  |  |  | **2** |
|  | k.      TNI/POLRI | Orang |  |  |  |  | - | **2** |
|  | l.       Pengusaha Kecil, Menengah & Besar | Orang |  |  |  |  | - | **14** |
|  | m.    Guru Swasta | Orang |  |  |  |  | - | **13** |
|  | n.     Pedagang keliling | Orang |  |  |  |  | - | **5** |
|  | o.     Penambang | Orang |  |  |  |  |  | **1** |
|  | p. Tukang kayu/Tukang Batu | Orang |  |  |  |  |  | **15** |
|  | q. Dukun Tradisional | Orang |  |  |  |  |  | **2** |
|  | r. Karyawan Perusahaan Swasta | Orang |  |  |  |  |  | **38** |
|  | Karyawan Perusahaan Pemerintahan | Orang |  |  |  |  |  | **2** |
|  | Wiraswasta | Orang |  |  |  |  |  | **171** |
|  | Tidak mempunyai Pekerjaan Tetap | Orang |  |  |  |  |  | **138** |
|  | Belum Bekerja | Orang |  |  |  |  |  | **248** |
|  | Pelajar | Orang |  |  |  |  |  | **667** |
|  | Ibu Rumah Tangga | Orang |  |  |  |  |  | **839** |
|  | Jumlah Total |  |  |  |  |  |  | **2.895** |
| 4. | Tingkat Pendidikan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.  Lulusan pendidikan Umum |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)  Tamat Sekolah Dasar/sederajat | Orang |  |  |  |  |  | **888** |
|  | 2 SMP/Sederajat | Orang |  |  |  |  |  | **329** |
|  | 3)  SMA/Sederajat | Orang |  |  |  |  |  | **305** |
|  | 4)  Akademi/D1 | Orang |  |  |  |  |  | **23** |
|  | 5)  Akademi/D2 | Orang |  |  |  |  |  | **20** |
|  | 6)  Akademi/D3 | Orang |  |  |  |  |  | **1** |
|  | 7)  Sarjana/S1 | Orang |  |  |  |  |  | **73** |
|  | 8)  Sarjana/S2 |  |  |  |  |  |  | **1** |
|  | 9)  Sarjana/S3 | Orang |  |  |  |  |  | **1** |
|  | JUMLAH | Orang |  |  |  |  |  | **1.641** |
| 5. | Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS | Orang |  |  |  |  |  |  |

**2.1.4. Sumber Daya Pembangunan**

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Benteng yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4

Sumber Daya Pembangunan Desa Benteng Tahun 2015

| **No.** | **Uraian Sumber Daya Alam** | **Jumlah** | **Satuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kantor Desa | Permanen | |
| 2. | **Prasarana Umum** |  |  |
|  | 1. Jalan |  | Km |
|  | 1. Jembatan |  | Buah |
| 3. | Prasarana Pendidikan |  |  |
|  | 1. Perpustakaan Desa | 1 | Buah |
|  | 1. Gedung Sekolah PAUD | 2 | Buah |
|  | 1. Gedung Sekolah TK | 2 | Buah |
|  | 1. Taman Pendidikan Al Qur’an |  | Buah |
|  | 1. Gedung SD/Sederajat | 6 | Buah |
|  | 1. Gedung Sekolah SMP/Sederajat | 2 | Buah |
|  | 1. Gedung Sekolah SMA/Sederajat | - | Buah |
|  | 1. Gedung Perguruan Tinggi | - | Buah |
| 4. | Prasarana Kesehatan |  |  |
|  | 1. Puskesmas Pembantu (pustu) | 1 | |
|  | 1. Poskesdes | 1 | Buah |
|  | 1. Posyandu | 5 | Buah |
|  | 1. Polindes | - | Buah |
|  | 1. MCK | 2 | Buah |
|  | 1. Sarana Air Bersih | 1 | Buah |
| 4. | Prasarana Ekonomi |  |  |
|  | 1. Pasar Desa | - | Buah |
|  | 1. Kios desa | - | Buah |
| 5. | Prasarana Ibadah |  |  |
|  | 1. Mesjid | 5 | Buah |
|  | 1. Mushola | - | Buah |
| 6. | Prasarana Umum |  |  |
|  | 1. Olahraga | 1 | Buah |
|  | 1. Kesenian/budaya | - | Buah |
|  | 1. Balai pertemuan | 1 | Buah |
|  | 1. Sumur desa | 1 | Buah |
|  | 1. Pasar desa | - | Buah |

**2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya**

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Lompulle yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Sumber Daya Sosial Budaya** | **Ada/ tidak** | **Tahun** | | | | | |
| **n-6** | **n-5** | **n-4** | **n-3** | **n-2** | **n-1** |
| 1. | LPMD | Ada |  |  |  |  |  | Ada |
| 2. | TP PKK | Ada |  |  |  |  |  | Ada |
| 3. | BUMDes | Ada |  |  |  |  |  | Ada |
| 4. | Karang Taruna | Ada |  |  |  |  |  | Ada |
| 5. | RT/RW | Ada |  |  |  |  |  | Ada |

**2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

**2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di usulkan 3 Kegiatan,dan semua kegiatan yang diusulkan terealisasi semua. Realisasi kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 6

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Perencanaan | | | | | Realisasi | | |
| Kegiatan | Lokasi | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1. | Penghasilan tetap dan tunjangan | Desa Lompulle | 18 org | 317.460.000 | Bantuan Keuangan Pemkab | 24 org | 317.460.000 | Bantuan Keuangan Pemkab |
| 2. | Operasional Perkantoran | Desa Lompulle |  | 101.154.681 | ADD 30%, PADesa, Silpa 2014 |  | 101.154.681 | ADD 30%, PADesa, Silpa 2014 |
| 3. | Operasional BPD | Desa Lompulle |  | 15.400.000 | ADD 30% |  | 15.400.000 | ADD 30% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Bidang Pembangunan Desa di usulkan 4 Kegiatan, semuanya berupa perkerasan jalan, baik jalan tani maupun jalan dusun dan semua kegiatan yang diusulkan terealisasi semua. Realisasi kegiatan di bidang Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 7

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Perencanaan | | | | | Realisasi | | |
| Kegiatan | Lokasi | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1. | Pembangunan Rabat Beton Jalan ke Pekuburan | Desa Lompulle |  | 181.299.978 | ADD |  | 181.299.978 | ADD |
| 2. | Pembangunan Drainase Dusun Alliwengeng | Desa Lompulle |  | 215.760.057 | ADD |  | 215.760.057 | ADD |
| 3. | Pembangunan WC Pustu Lompulle | Desa Lompulle |  | 23.400.625 | ADD |  | 23.400.625 | ADD |
| 4. | Pembangunan Gedung PKK Dusun Alliwengeng | Desa Lompulle |  | 32.803.394 | ADD |  | 32.803.394 | ADD |
| 5. | Pembangunan Jalan Tani Dusun Mattanru | Desa Lompulle |  | 144.499.956 | Dana Desa |  | 144.499.956 | Dana Desa |
| 6 | Pembangunan Jembatan Tani Cennae Dusun Mattanru | Desa Lompulle |  | 185.952.022 | Dana Desa |  | 185.952.022 | Dana Desa |
| 7 | Pembangunan Jembatan Tani Latulejeng Dusun Mattanru | Desa Lompulle |  | 185.852.022 | Dana Desa |  | 185.852.022 | Dana Desa |

**2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Untuk tahun 2016, Desa Lompulle belum menyelenggaran kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

**2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di usulkan 4 Kegiatan,dan ada kegiatan yang belum terealisasi, yaitu Kegiatan Pengembangan UKM Kelompok Industri Rumah Tangga.. Realisasi kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 8

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Perencanaan | | | | | Realisasi | | |
| Kegiatan | Lokasi | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1. | TP. PKK | Lompulle |  | 16.500.000 | ADD | 1 Tahun | 16.500.000 | ADD |
| 2. | TK. Al-Ikhwan Maniangpatu | Lompulle |  | 5.900.000 | ADD | 1 Tahun | 5.900.000 | ADD |
| 3. | KB. Al-Ikhwan Maniangpatu | Lompulle |  | 4.550.000 | ADD | 1 Tahun | 4.550.000 | ADD |
| 4. | Karang Taruna Al-Mubaraqah | Lompulle |  | 1.334.000 | ADD | 1 Tahun | 1.334.000 | ADD |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Perencanaan | | | | | Realisasi | | |
| Kegiatan | Lokasi | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Vol. | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1. | Peningkatan SDM | Desa Lompulle |  | 21.770.000 | ADD | 1 Tahun | 21.770.000 | ADD 30% |
| 2. | Pemilihan Kepala Desa | Desa Lompulle |  | 32.000.000 | ADD | 1 Tahun | 32.000.000 | ADD |

**2.3. Permasalahan dan Isu Strategis**

1. **Permasalahan**
2. **Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Benteng yang harus mendapat perhatian pada tahun 2016 adalah :

(1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;

(2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta

(3) Pemberantasan jentik nyamuk yang menyebabkan demam berdarah ;

(4) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

1. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Benteng yang harus mendapat perhatian pada tahun 2016 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

1. **Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Benteng juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Benteng.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Benteng menurut data PPLS Tahun 2015 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 672 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Benteng adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Benteng supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

1. **Peningkatan Infrastruktur**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam meratakan pembangunan, baik melalui program pembangunan yang berskala desa, kabupaten maupun provinsi serta pusat. Pemerintah Desa Benteng juga terus berupaya ikut berperan dalam memeratakan pembangunan infrastruktur

Upaya pemerintah Desa Lompulle dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah : (1) Membangun infrastruktur yang tepat sasaran dan (2) Menyediakan sumber daya manusia serta sumber daya alam.

1. **Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Benteng yaitu, Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan awal pembangunan desa dengan prinsip “satu desa satu perencanaan dan satu anggaran” merupakan semangat dan pandangan yang utama dalam UU Desa. Sejalan dengan prinsip kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa. Pandangan, satu desa satu perencanaan dan satu anggaaran, bertujuan untuk menegakkan kewenangan desa dalam mengambil keputusan tentang perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik karena desa merupakan ujung tombak pembangunan.

**BAB III**

**GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

* 1. **Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya**

Pada Tahun 2016 Realiasasi pendapatan Desa Lompulle sebesar Rp. **1.866.603.735** ( Satu Milliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 100 % dari target pendapatan desa tahun 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| **1.** | **Pendapatan Asli Desa** |  |  |
|  | Hasil Usaha | 1.306.800 | 1.306.800 |
|  | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 27.500.000 | 27.500.000 |
|  | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Pendapatan Transfer** |  |  |
|  | Dana Desa | 645.304.000 | 645.304.000 |
|  | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota |  |  |
|  | Alokasi Dana Desa | 799.912.935 | 799.912.935 |
|  | Bantuan Keuangan | 392.280.000 | 392.280.000 |
|  | Bantuan Provinsi |  |  |
|  | Bantuan Kabupaten / Kota |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Pendapatan Lain lain** |  |  |
|  | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |  |  |
|  | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |  |  |
| **JUMLAH** | | **1.866.603.735** | **1.866.603.735** |

* 1. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatn desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuanagn dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1. 993.338.160 (Satu Milliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) yang berasal dari :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sumber** | **Perkiraan** | | **Ket.** |
| **I** | **Pendapatan Asli Desa sebesar:** | **Rp.** | 1.306.800 |  |
|  | 1.1. Hasil Usaha Desa | Rp. | 1.306.800 |  |
|  | 1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | Rp. | - |  |
|  | 1.3. Swadaya | Rp. | - |  |
| **II** | **Sisa Perhitungan Anggaran 2016** | **Rp.** | 182.679.080 |  |
| **III** | **Pendapatan Desa** | **Rp.** | 1. 993.338.160 |  |
|  | 3.1. TPAD | Rp. | - |  |
|  | 3.2. Bantuan Keuangan dari Kabupaten | Rp. | - |  |
|  | 3.3. Bagi Hasil Pajak Kabupaten | Rp. | - |  |
|  | 3.4. Hibah | Rp. | - |  |
|  | 3.5. Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. | - |  |
|  | 3.6. Alokasi Dana Desa | Rp. | 1.170.862.499 |  |
|  | 3.7. Dana Desa | Rp. | 822.475.670 |  |
| **Total Pendapatan Desa** | | **Rp.** | **2.176.017.240** |  |

**BAB IV**

**PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Benteng yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

* + 1. **Bidang Pemerintahan Desa**

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa
2. Operasional Perkantoran Desa
3. Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD
4. Pembayaran tunjangan Imam Desa/Imam Dusun, Pegai syara’ dan guru mengaji.
5. Biaya makan dan minum rapat/tamu
6. Biaya perjalanan dinas (di dalam dan luar daerah)
7. Pengadaan Kamera
8. Pengadaan Laptop,Komputer, Print & Modem
9. Pengadaan Infokus & sound system
10. Pengadaan Kursi Rapat
11. Pengadaan Meja kantor
12. Pengadaan Kursi Kantor
13. Pengadaan Umbul-umbul
14. Pembayaran Air, listrik dan Telepon
15. Pembayaran surat kabar/majalah
16. Insentif Kader Posyandu
17. Insentif Kader Infrasturktur Desa
18. Insentif RT/RW
    * 1. **Bidang Pembangunan Desa**
19. Perintisan Jalan Tani dan Jembatan Labalaceng ke Doping Lama ± 300 meter
20. Perintisan Jalan ke Pekuburan Lebong Loang ± 1 km
21. Perintisan Jalan Tani Lebong Loang ke Cempae ± 3 km
22. Perintisan Jalan Tani Pude’e ke Lebongnge ± 2 km
23. Pengadaan gorong-gorong
24. Perbaikan dan Pengadaan Dekker
25. Pembuatan Jembatan di Orai Salo
26. Pengadaan Lampu Jalan Merkury
27. Penggalian Sungai Teppo Lebeng Doping Lama – Pellengnge ± 2 km
28. Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa (Plafon, Jendela dan Pintu)
29. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa (Pemasangan pavinblock)
30. Pengadaan jamban kelurga
    * 1. **Pembinaan Kemasyarakatan**
31. Pembinaan Keagamaan

* Maulid Nabi Muhammad SAW
* Buka Puasa bersama
* Isra' Mi'raj

1. Pembinaan kelompok majelis ta'lim
2. Pembinaan kelompok Pemuda dan olahraga

- pengadaan perlengkapan olahraga

- pengadaan kostum sepak bola

- pengadaan kostum takrow

1. pembinaan kelompok dasa wisma

* Pembinaan PKK
  + 1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pelatihan tata boga PKK
2. Pelatihan Kepala Desa, aparat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
3. Pelatihan Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes
4. Pelatihan Kader KB dan Posyandu
5. Pelatihan Penyusunan Perdes Partisipatif
6. Pelatihan kader teknik dan RAB
7. Pelatihan TPK dan Panitia lelang
8. Pelatihan Tim Pemantau
9. Pelattihan BUMDs
10. Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
11. Pelatihan kader Posyandu
12. Pelatihan tutor PAUD
13. Pelatihan Badan Kerja Sama Antar Desa

4.2. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Tiang pancang
3. Pengerukan Tappareng Salae
4. Saluran Pembuangan Lokajawae
5. Penggalian Drainase Sepanjang jalan Raya serta pondasi tembok pinggir jalan
6. Dinas Tata Ruang
7. Pengadaan dan Penambahan tiang jaringan listrik
8. Dinas Pertanian
9. Dam Parik
10. Saluran Pembuangan Sefe Tengae
11. Sumur bor Tanah Dalam
12. Lanjutan jaringan Tingkat Usaha Tani (JITU)
13. Jembatan Tani lakalukku
14. Dinas Kesehatan
15. Pengadaan ambulance desa
16. DPMD
17. Tanggul Penahanan Banjir
18. Pembangunan Sekretariat PKK
19. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
20. Pembangunan tribun Lapangan sepak bola Desa Lompulle
21. Dinas Pendidikan
22. Rehab Ruang Kelas dan Gedung UKS SD 115 Alliwengeng
23. Pagar gedung Ruang kelas rehab Perumahan Kepala Sekolah dan Guru; Rehab Ruang Kelas; Paving Blok Lapangan; Pengadaaan Buku Perpustakaan SD 116 Mattanru.
24. Pagar depan dan pintu Gerbang; Moubiler; Ruang Kerja Belajar; Pemansangan tegel dan Plafond Perpustakaan; Pembangunan Gedung UKS dan paving Blok dan rumah dinas kepala sekolah SD 203 Lamalampe
25. Pagar dan pintu gerbang; ; Moubiler; Paving Blok; Tuang Gur; 1 set alat olahraga dan jaringan WIFI SD 117 Maniangpatu
26. Dinas Sosial
27. Bedah rumah
28. Bantuan PKH
29. Lansia
30. Bantuan Orang Cacat
31. Bantuan dana orang Miskin

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

**BAB V**

**PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Dalam Pelaksana Kegiatan Desa Lompulle Tahun 2017 dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari dari unsur perangkat desa, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya.

1. Tim Pelaksana Kegiatan terdiri atas:
2. Pembina : Amri, S.Sos
3. Ketua : Drs. Abd. Rahim
4. Sekretaris : H. Tassakka, SE
5. Anggota : Arafah
6. Anggota : Munardiansyah
7. Anggota : Lili Muliasari
8. Anggota : Sukardi
9. Anggota : Usman

**BAB V**

**P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sam lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Lompulle, Februari 2017

**KEPALA DESA LOMPULLE**

**A M R I, S.Sos**

**LAMPIRAN**

Tabel 9

PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA LOMPULLE

TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan sumber pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan |
| Bidang | Jenis Kegiatan | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama antar Desa | Kerjasama Pihak ketiga |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | Pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan aparat desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 1 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 2 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JUMLAH PER BIDANG 3 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 4 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

Tabel .....

Daftar Usulan RKP Desa ....... Kecamatan ...........

Tahun .....................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp.) |
| Bidang | Jenis Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 1 | | | | | | | |  |
| 2. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | a. |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 2 | | | | | | | |  |
| 2. | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | a. |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |
|  | JUMLAH PER BIDANG 3 | | | | | | |  |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | a. |  |  |  |  |  |  |
| b. |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH PER BIDANG 4 | | | | | | | |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | |  |



Pelaksanaan

Desa

Desa

Desa

**Tabel ......**

**Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten**

**yang Masuk ke Desa ..... Tahun .......**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **SKPD Pengelola** | **Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)** | **Volume** | **Satuan** | **Pagu Dana (Rp)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH (RP)** | | | | | |  |

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**DESA BENTENG KECAMATAN PENRANG KAB. WAJO**

**TAHUN 2016**

**RAB No. :**

**Bidang :** Penyelenggara Pemerintah Desa

**Kegiatan :** Penghasilan Tetap Kades dan Aparatur, Insentif RT, RW, Tunjangan Anggota BPD dan operasional Pemdes, Operasional BPD dan perjalanan Dinas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan (Rp)** | **Jumlah Total (Rp)** | **Jumlah** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 2 x 4** | **6** |
| Belanja pegawai dan penghasilan tetap |  |  |  |  |  |
| Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa |  |  |  |  |  |
| * Kepala Desa | 12 | Bulan | 2.100.000 |  |  |
| * Sekdes | 12 | Bulan | 750.000 |  |  |
| * Kaur dan Kadus 6 orang | 12 | Bulan | 500.000 |  |  |
| **JUMLAH** |  |  |  |  |  |
| * Insentif RT 12 RT | 12 | Bulan |  |  |  |
| * Insentif RW | 12 | Bulan |  |  |  |
| **JUMLAH** |  |  |  |  |  |
| * Tunjangan Anggota BPD 5 orang | 12 | Bulan |  |  |  |
| **JUMLAH** |  |  |  |  |  |

**Keterangan :** Masing-masing kegiatan yang tertuang pada Tabel Prioritas Kegiatan Dan Anggaran Desa harus dibuat RAB dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Desa.